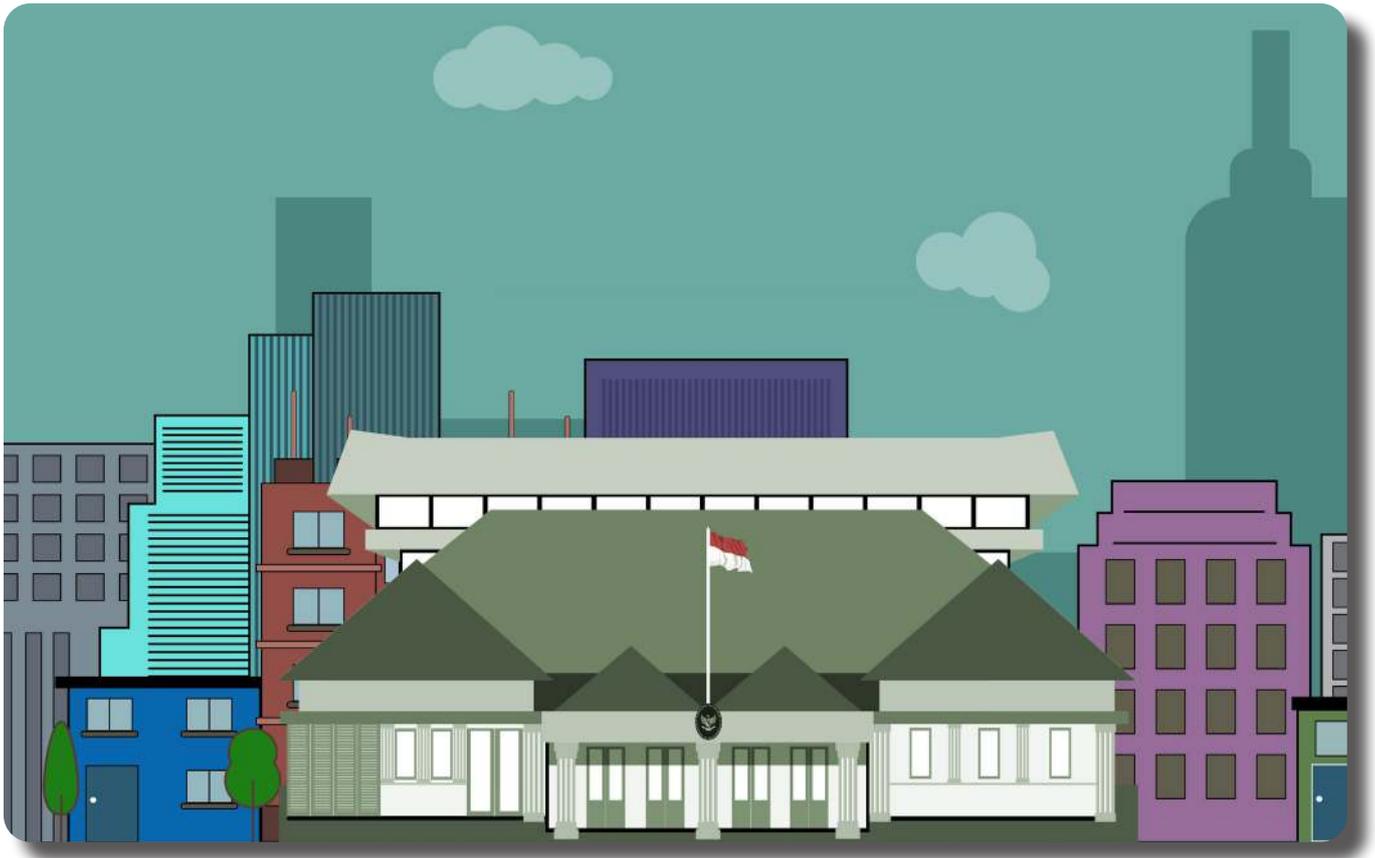




**Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TAHUN 2020

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi ini kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.
2. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keterbukaan Informasi Publik pun menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dengan Keterbukaan Informasi Publik, penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan.
3. Dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan serta amanah.
4. Komitmen mewujudkan keterbukaan informasi tersebut kemudian dituangkan melalui Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumen di Kemenko Polhukam. Aturan itu dilengkapi dengan terbitnya Permenko Polhukam Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam dan Permenko Polhukam Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kemenko Polhukam. Aturan-aturan tersebut lantas diperbarui

dengan hadirnya Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam.

5. PPID Kemenko Polhukam secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi Publik yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
6. Salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi sebagaimana tercantum pada UU KIP Pasal 11 ayat (1) huruf h serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Bab VII Laporan dan Evaluasi Pasal 36.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENKO POLHUKAM:

Informasi merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Informasi juga merupakan bentuk realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari UUD 1945 yang diamanatkan dalam pasal 28F mengenai hak atas informasi, bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Maka dari itu, pemerintah pun membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi

Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KI yang mewajibkan seluruh badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan sistem pelayanan informasi publik.

Hal ini dapat dijadikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi, yang juga merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, sistem negara yang demokratis, dan *good governance*, merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat mendorong keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membentuk PPID melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan tepat waktu, PPID Kemenko Polhukam memiliki beberapa sarana dan prasarana layanan informasi publik, antara lain:

- a. Meja penerima
- b. Formulir permohonan informasi secara *online*
- c. Formulir keberatan permohonan informasi secara *online*

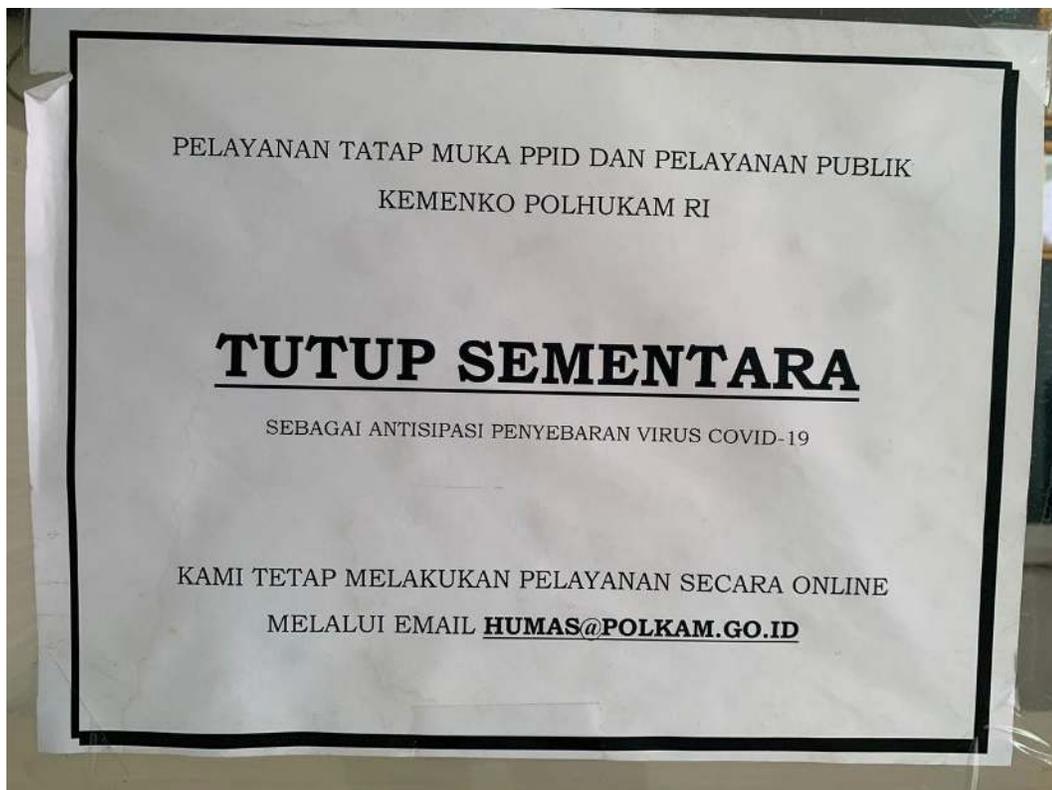
- d. Komputer terkoneksi internet
- e. Website <https://ppid.polkam.go.id/>
- f. Banner Informasi Digital

Seperti yang diketahui, tahun 2020 seluruh dunia terkena Covid-19, yang tentunya berdampak kepada seluruh aspek kehidupan seluruh warga di dunia, termasuk juga dengan layanan *offline* atau tatap muka yang tersedia di Kantor Kemenko Polhukam. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, PPID Kemenko Polhukam memiliki *front desk* khusus untuk melayani masyarakat yang datang. Seluruh pelayanan yang diberikan pun masih bersifat manual. Masyarakat yang datang untuk meminta informasi, akan diberikan formulir untuk diisi sesuai dengan keperluan dan kepentingan permintaan informasi tersebut. Jika formulir dan persyaratan lainnya sudah dilengkapi, petugas Pelayanan Publik atau PPID yang bertugas di *front desk* akan menindaklanjuti permohonan informasi tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.



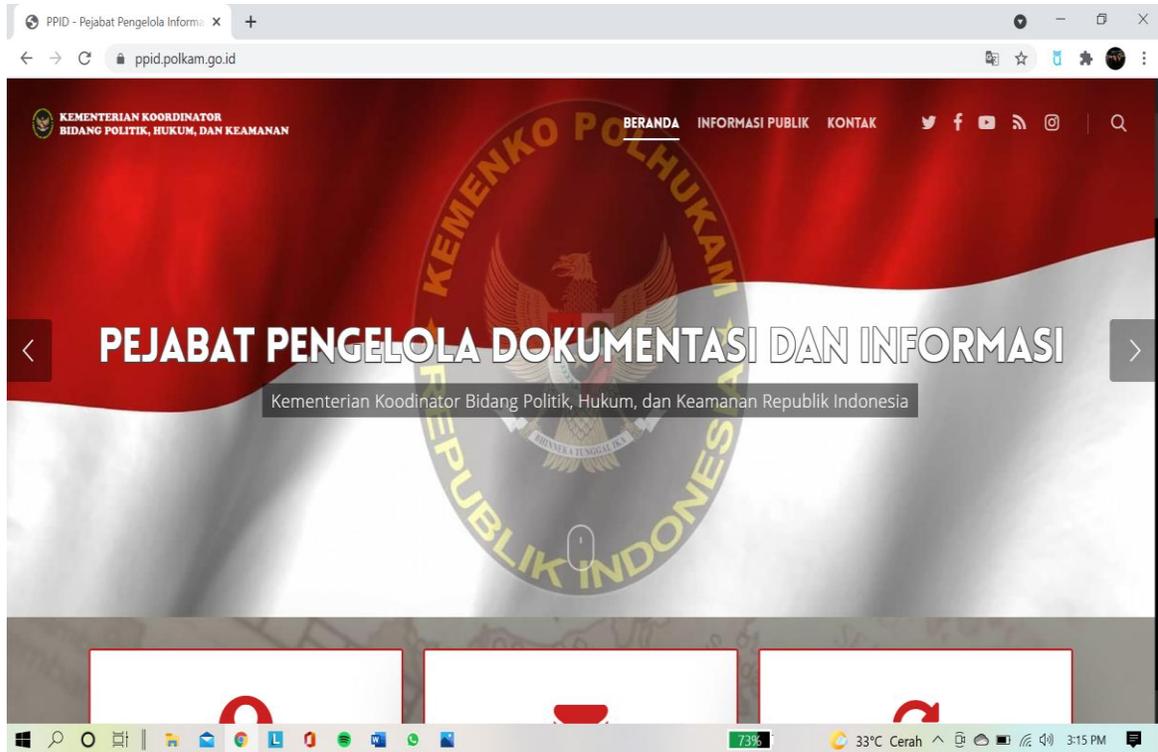
Gambar Meja Pelayanan Publik dan PPID sebelum pandemi Covid-19

Seperti Kementerian/Lembaga lainnya, dalam rangka mencegah penularan Covid-19, maka seluruh pelayanan informasi di lingkungan Kemenko Polhukam beralih kepada layanan *online*. Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polhukam memang tidak mendapat permohonan informasi yang banyak seperti kementerian teknis yang harus untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga masih sangat memungkinkan apabila pelayanan publik dan permohonan informasi tidak dilakukan secara tatap muka. Namun, pelayanan publik dan permohonan informasi di lingkungan Kemenko Polhukam tetap dibuka dan berjalan secara *online*, yaitu lewat email humas@polkam.go.id.

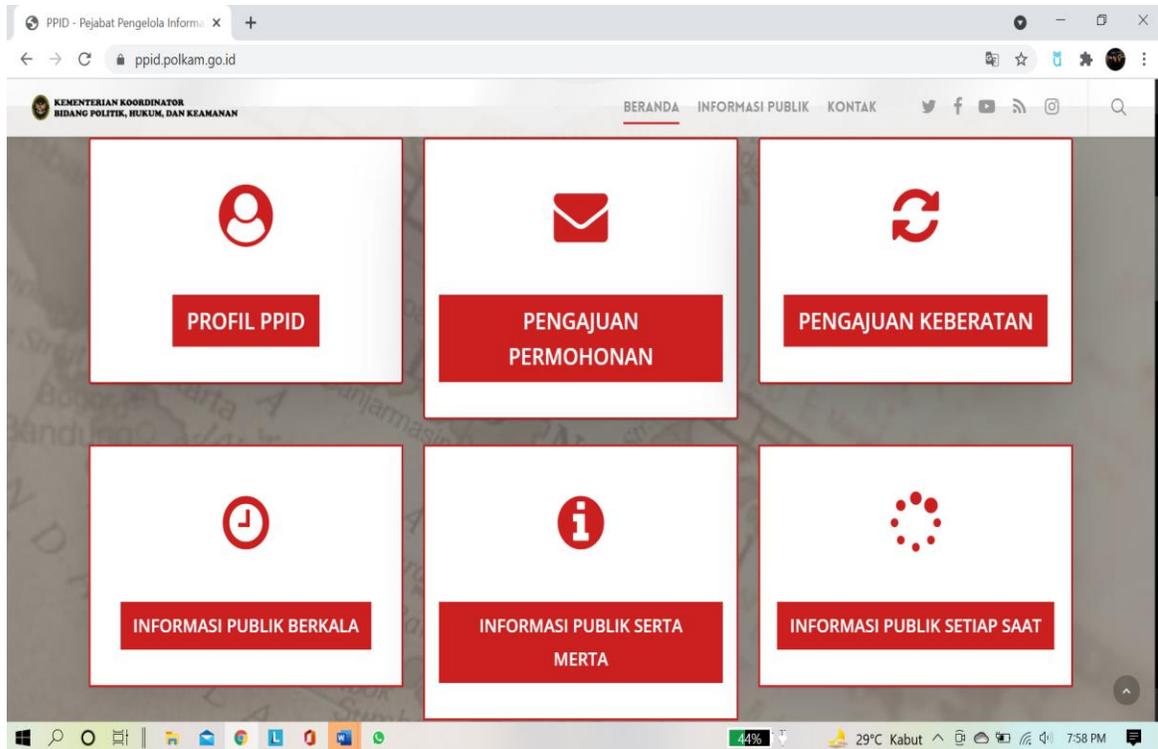


Gambar Pengumuman Pelayanan Publik Kemenko Polhukam ditutup sementara

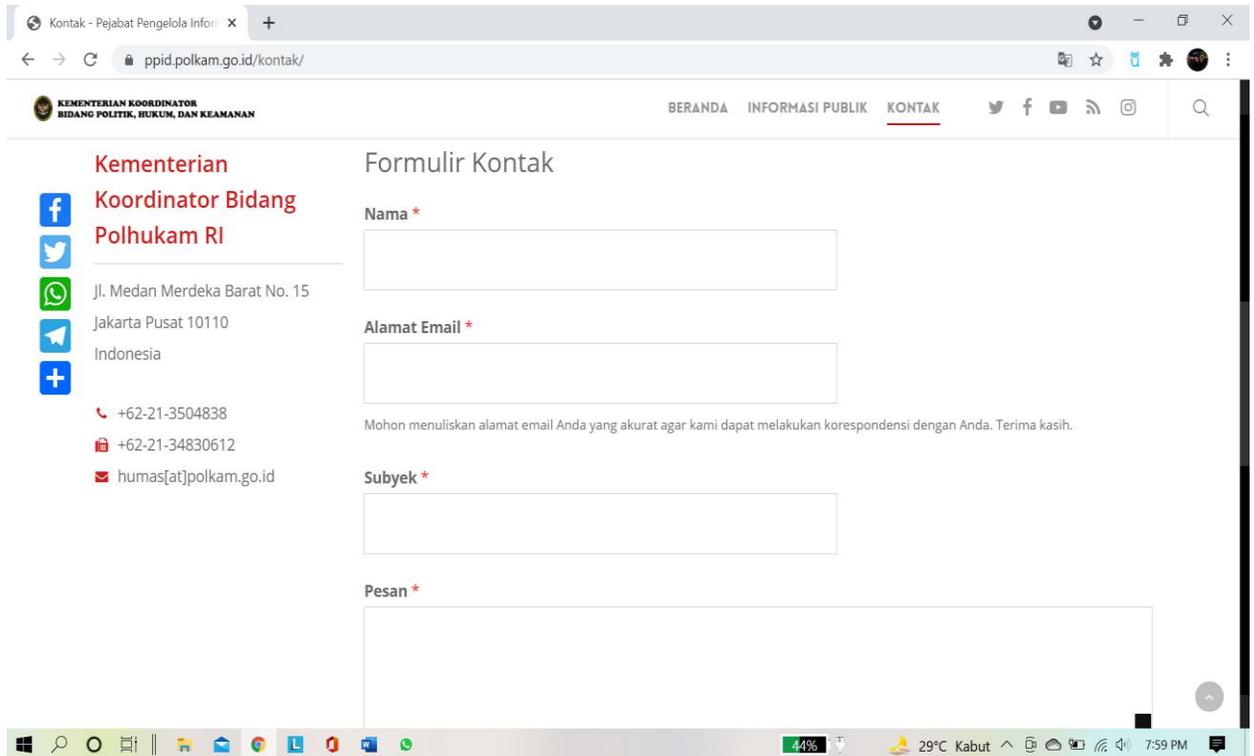
Melihat hal ini, Tim PPID juga terus melakukan inovasi terhadap website khusus PPID, yang sudah terintegrasi langsung dari website utama Kemenko Polhukam, yaitu ppid.polkam.go.id, berikut beberapa tampilan website ppid dan beberapa layanan didalamnya:



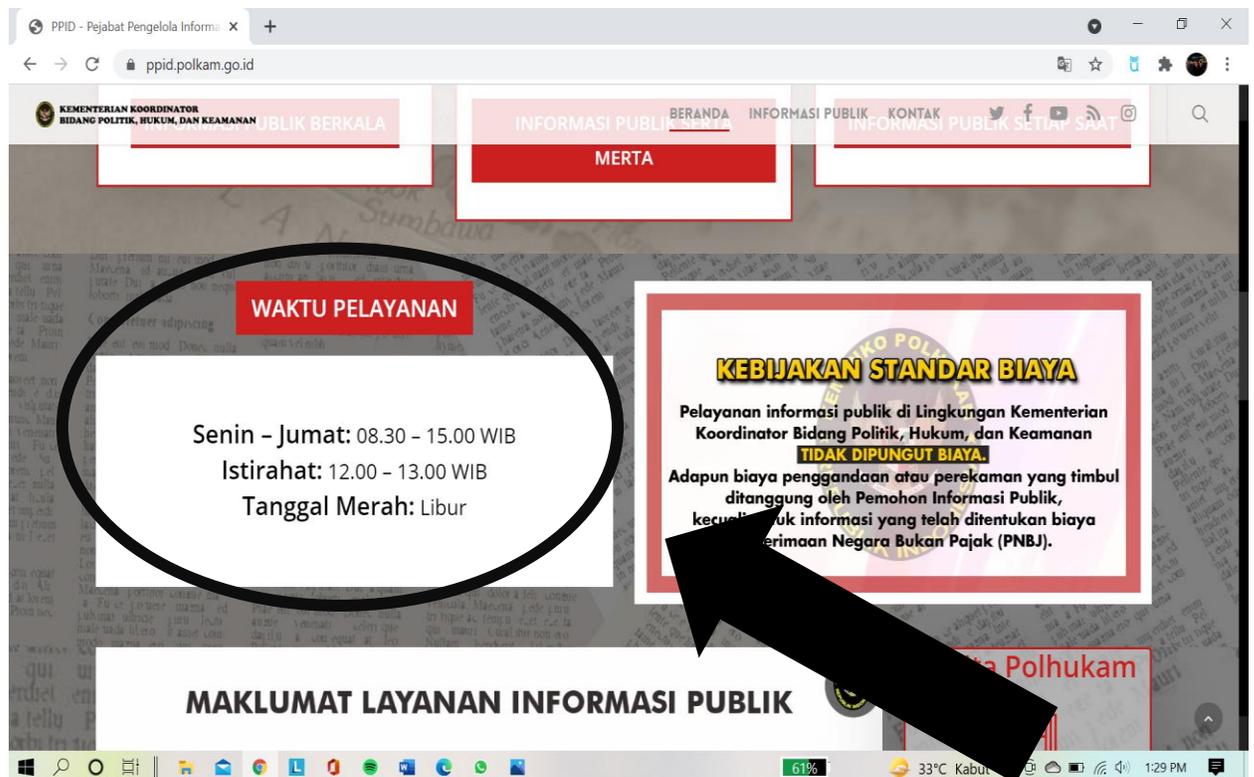
Gambar Layanan Online tersedia pada website PPID Kemenko Polhukam



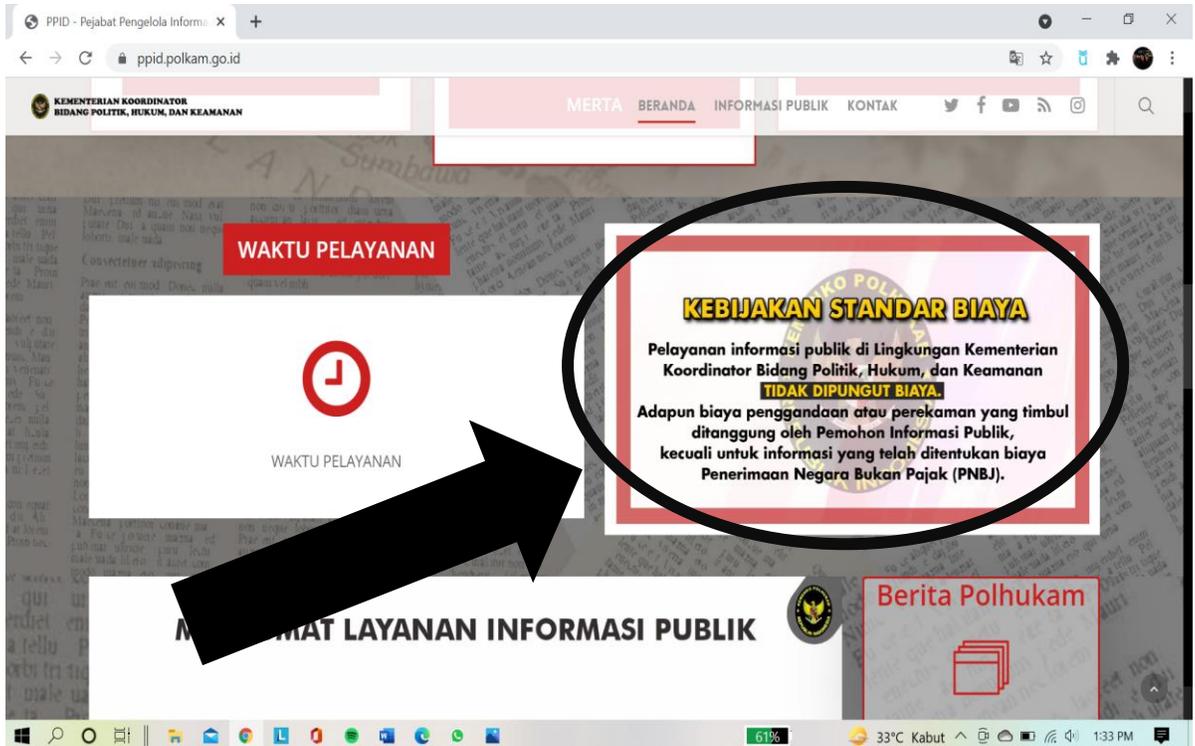
Gambar Layanan Online tersedia pada website PPID Kemenko Polhukam



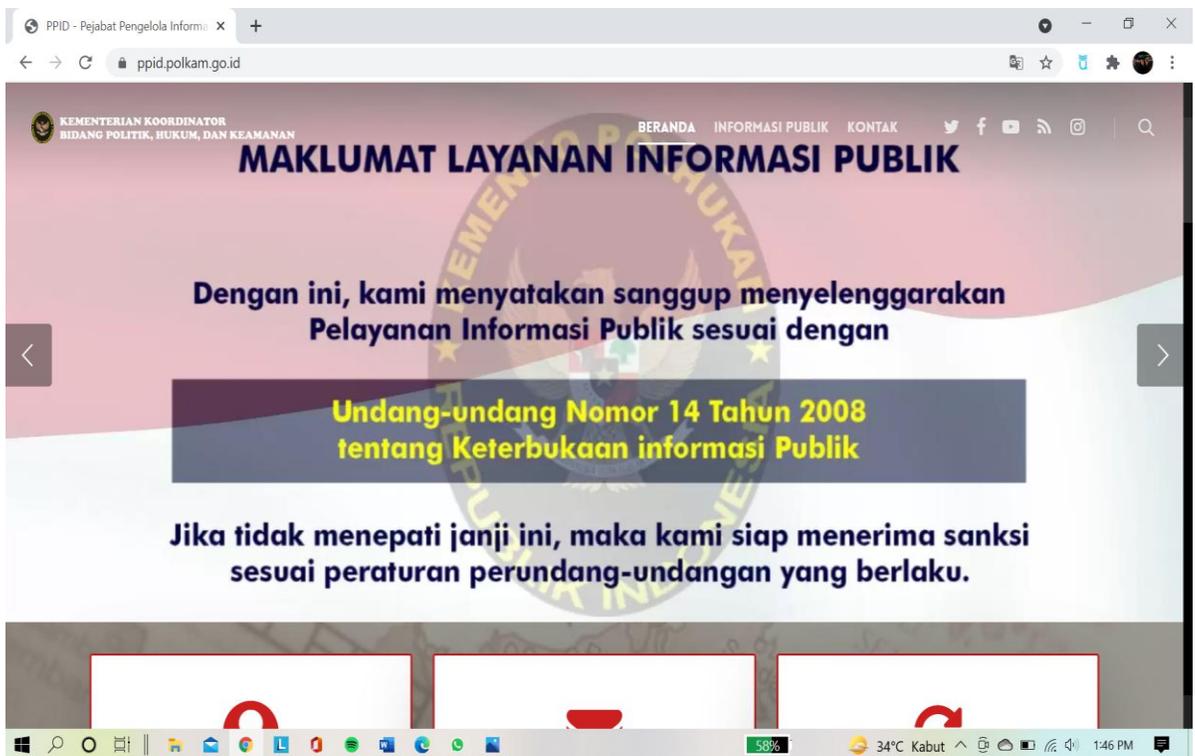
Gambar Layanan Online tersedia pada website PPID Kemenko Polhukam



Gambar Waktu Pelayanan yang tertera di website PPID



Gambar Kebijakan Standar Biaya Pelayanan yang tertera di website PPID



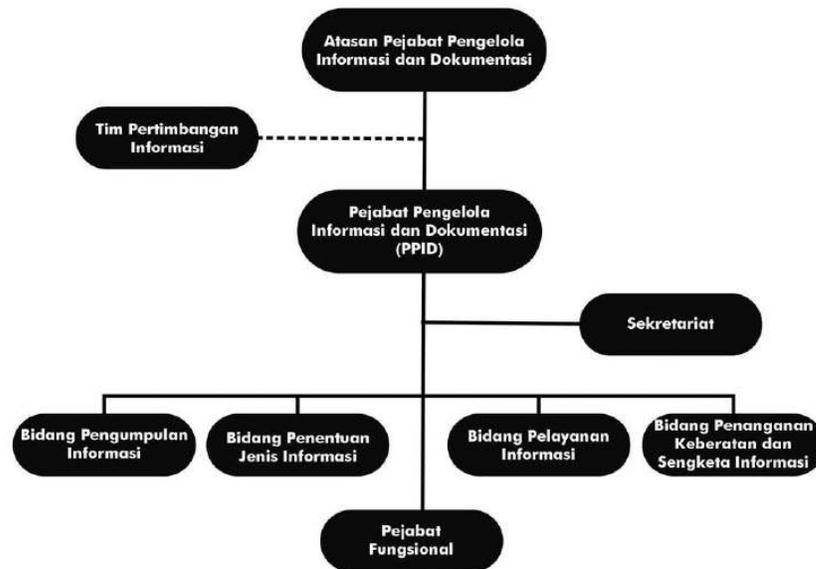
Gambar Maklumat Pelayanan yang tertera di website PPID

2. Sumberdaya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perangkat PPID terdiri dari:

- a. 1 orang Atasan PPID, yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. 8 orang Tim Pertimbangan dari setiap satuan kerja, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
- c. 1 orang PPID, yaitu Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
- d. 1 orang Sekretaris, yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, yang beranggotakan 4 orang;
- e. Anggota Bidang Pengumpulan Informasi, berjumlah 6 orang;
- f. Anggota Bidang Penentuan Jenis Informasi, berjumlah 10 orang;
- g. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, berjumlah 5 orang;
- h. Anggota Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi, berjumlah 4 orang;
- i. Pejabat Fungsional, berjumlah 2 orang.

3. Struktur PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



4. Adapun beberapa kegiatan yang sekiranya dapat menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID Semester I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan PPID di lingkungan Kemenko Polhukam sampai dengan Semester I Tahun 2021, yaitu bulan Januari sampai Juni 2020 dapat berjalan lancar, efisien dan tepat waktu. Masing-masing unit pelayanan yaitu Bidang PPID, Bidang Layanan Barang/Jasa maupun Bidang Pelayanan Fungsional Kedeputusan telah menjalankan tugas pelayanan dan informasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar pelayanan yang telah ditentukan. Seluruh anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi terus melakukan verifikasi bahan informasi, serta segera melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. menyediakan informasi dan dokumentasi

untuk diakses oleh masyarakat, menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan informasi dan dokumentasi, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, dan menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.

Pada semester I ini, Permohonan permintaan informasi berjumlah 11 permohonan. Permintaan informasi di dominasi oleh Kedeputian III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Seluruh permohonan informasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh unit kedeputian terkait.

- b. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID Semester II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan PPID di lingkungan Kemenko Polhukam sampai dengan Semester II Tahun 2021.

Pada semester II, Kemenko Polhukam menerima enam permohonan permintaan yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh kedeputian terkait. Informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik harus dilakukan dengan optimal guna meningkatkan kualitas layanan informasi maka diperlukan peran aktif anggota PPID Kemenko Polhukam guna meningkatkan terwujudnya sistem pemerintahan yang baik *Good Governance*.

Penerapan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator bahwa Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi yang berkualitas.

Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Semester II Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Kemenko Polhukam selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENKO POLHUKAM:

Rincian Pelayanan informasi publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI periode Januari s/d Desember 2020 sebanyak 17 permohonan.

2. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan:

a. Tepat Waktu (≤ 17 hari) : 17 Permohonan (100%)

b. Tidak Tepat Waktu (≥ 17 hari) : 0 Permohonan (0 %)

Alasan : dokumen atas permohonan informasi terdapat di kedeputian/bagian lain selaku PPID Pelaksana sehingga memerlukan waktu untuk berkoordinasi serta adanya kebijakan WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) yang membatasi ruang gerak dalam pengumpulan data atau informasi yang diminta tapi tidak melebihi jangka waktu perpanjangan yang selama 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang- undangan dan peraturan Komisi Informasi Pusat terkait layanan informasi publik.

3. Jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi atau ditolak: 0 permohonan (0 %).

4. Alasan: Informasi yang dimohon merupakan informasi publik yang dikecualikan.

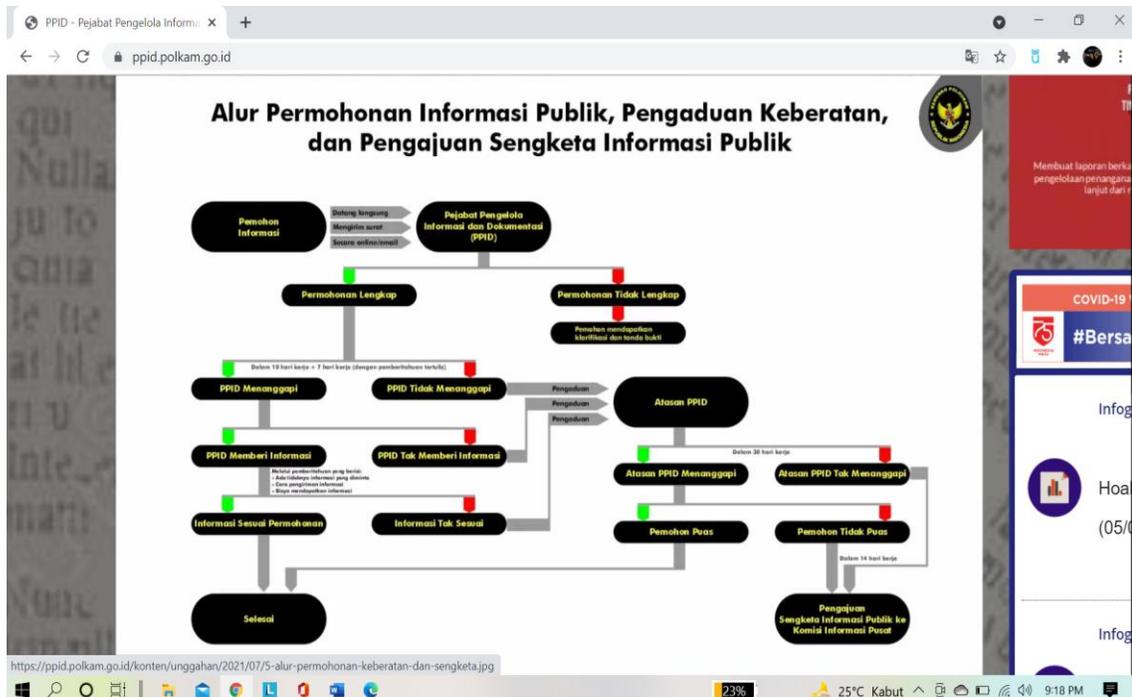
5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020.

No	Bulan	JML	Pemenuhan			
			Selesai Proses	Ditolak	Tidak Tepat	Tepat Waktu
1	Januari	2	2	0	0	2
2	Februari	3	3	0	0	3
3	Maret	1	1	0	0	1
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0

6	Juni	5	5	0	0	5
7	Juli	1	1	0	0	1
8	Agustus	1	1	0	0	1
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	3	3	0	0	3
12	Desember	1	1	0	0	1
JUMLAH		17	17	0	0	17

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENSKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2020, terdapat 17 permohonan informasi yang ditujukan kepada Kemenko Polhukam. Tidak ada permohonan informasi yang ditolak dan juga tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap informasi yang diterima tersebut. Sehingga tidak ada penyelesaian sengketa publik yang dilakukan pada tahun 2020. Namun demikian, Tim PPID Kemenko Polhukam telah menyampaikan alur pengajuan keberatan dan sengketa mengenai informasi publik di website ppid.polkam.go.id



Gambar Alur Permohonan, Pengaduan Keberatan, dan Pengajuan Sengketa Informasi Publik

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

A. Kendala Internal

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan serta motivasi bagi PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.

Namun, dalam melaksanakan asas tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kemenko Polhukam. Diantaranya yaitu kendala internal, yakni:

- a. Penyediaan informasi tergantung pada suply data dan satuan kerja
- b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman setiap unit kerja
- c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik dan pengaduan
- d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi sehingga ritme pelayanan data tersendat atau bahkan dimulai dari awal lagi
- e. Sarana dan prasarana yang belum optimal

B. Kendala Eksternal

Selain kendala yang dihadapi oleh personil PPID di Kemenko Polhukam, terkadang kendala juga terdapat di lingkungan luar atau eksternal tim PPID sendiri, diantara yaitu :

- a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon terkadang meminta informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan yang tidak jelas, serta data pemohon yang tidak lengkap.
- b. Pemohon kurang memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi yang sama padahal data yang dimohon sebelumnya sedang diproses.

- c. Pemohon tidak melihat data informasi publik yang dimiliki oleh PPID Kemenko Polhukam, sehingga kerap kali informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang tidak dimiliki oleh PPID Kemenko Polhukam maupun informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- d. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu.
- e. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan untuk memeras pihak pihak tertentu.

F. REKOMENDASI

PPID Kemenko Polhukam terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID Utama.
- b. Mengoptimalkan SDM yang fokus dalam pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
- c. Melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi yang masuk, apabila yang diminta adalah termasuk DIK.
- d. Pemutakhiran SOP terkait layanan informasi.
- e. Melengkapi sarana dan prasarana.
- f. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi.

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Januari 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
Kedeputian I																			
NIHIL																			
Kedeputian II																			
NIHIL																			
Kedeputian III																			
1	18 September 2019	Law Office Muara Karta SH., MH. & Partners, Jakarta	Ruko Cempaka Mas Blok D1 No 11, Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat	(021) 42900199	Advokat	klarifikasi dan penjelasan terkait kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 27.000 meter persegi yang terletak di Jl. Inspeksi Kirana Cakung Deain No. 27 RT. 02, RW. 05, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Penyelesaian Kasus Hukum		✓				✓	telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komandan Korps Brimob Polri dengan nomor: B-37/HK.00.01/01/2020			10 Januari 2020		
2	30 Oktober 2019	Lembaga Pemerhati Masyarakat Indonesia, Takala	Kompleks BTN Pepabri Bajeng TR VIII No.21, Kel. Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan	085299328469		perihal permohonan konsultasi hukum & keterangan informasi	Penyelesaian Kasus Hukum		✓				✓	telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Syafaruddin, S.Sos dengan nomor: B-198/HK.00.01/01/2020			28 Januari 2020		
Kedeputian IV																			
NIHIL																			
Kedeputian V																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			

Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Februari 2020

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran		
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
																				Ya
Kedeputian I																				
1	27 Januari 2020	Surat dari DPRD Kabbupaten Batang Hari Muara Bulian	Jl. Jenderal Sudirman, Muara Bulian, kab. Batang Hari, Jambi	tidak ada	anggota DPRD	permohonan Konsultasi dan Koordinasi terkait penyelesaian konflik antara Masyarakat Desa Bungku/Dusun Tanjung Johor dengan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada	bantuan konsultasi penyelesaian konflik masyarakat Desa Bungku dengan PT. Asiatic Persada		✓	tidak		✓	meminta bantuan Kemenko Polhukam untuk memediasi konflik antara warga dengan perusahaan		Ditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas kepada Deputi III/Hukum dan HAM, Nomor: B57/DN.00.01/2/2020	tidak ada	ya, melalui nota dinas ke Deputi III/Kumham no. B57/DN.00.01/2/2021	11 Februari 2020	tidak ada	tidak ada
Kedeputian II																				
NIHIL																				
Kedeputian III																				
NIHIL																				
Kedeputian IV																				
1	10 Januari 2020	Loozaro Zebua (Ketua LSM Gerakan Anak Bangsa) Gunung Sitoli, Kab Nias	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Laporan dan Keluhan atas kasus tindak pidana									Ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Irwasum Polri Nomor: B-376/KM.00.01/2/2020			11 Februari 2020		
2	03 Februari 2020	Balitbang Kemhan	Jl. Jati 1 Rt.06/6 Pd. Labu, Jaksel	087870385857	PNS	Permohonan Izin Pengumpulan	Penelitian dan Pembangunan Kekuatan Kogabwilhan	✓	-	dokumentasi hp pribadi peneliti	-		audiensi	-	Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidkor Hanneg dengan disposisi kepada Asdep 4 untuk diaksi	-	-	27 Februari 2020	-	-
Kedeputian V																				
NIHIL																				
Kedeputian VI																				
NIHIL																				
Kedeputian VI																				
NIHIL																				

Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Maret 2020

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran		
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak											
Kedeputian I																				
1	17 Februari 2020	Surat dari Badan Pusat Statistik	Jl. Dr. Sutomo No.6-8, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat	tidak ada	Dir. Statistik Ketahanan Sosial	Permohonan Dukungan Pengumpulan Data Indikator Pemilu Tahun 2019 dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	bantuan untuk mengupdate enam indikator pemilu yang terdapat pada aspek hak politik dan lembaga demokrasi						meminta bantuan Kemenko Polhukam untuk mengupdate enam indikator pemilu yang terdapat pada aspek hak politik dan lembaga demokrasi		Ditindakanjuti oleh Asdep 3/1 dengan surat tandatangan Sesmenko kepada Ketua Bawaslu Nomor: B-770/DN.00.00/3/2020	tidak ada	ya, melalui Surat Sesmenko Polhukam Kepada Ketua Bawaslu RI dengan Nomor : B-770/DN.00.00/3/2020, Perihal Permohonan Data Pemilu terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	11 Maret 2020	tidak ada	tidak ada
Kedeputian II																				
NIHIL																				
Kedeputian III																				
NIHIL																				
Kedeputian IV																				
NIHIL																				
Kedeputian V																				
NIHIL																				
Kedeputian VI																				
NIHIL																				
Kedeputian VI																				
NIHIL																				

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan April 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya											
Kedeputian I																			
NIHIL																			
Kedeputian II																			
NIHIL																			
Kedeputian III																			
NIHIL																			
Kedeputian IV																			
NIHIL																			
Kedeputian V																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Mei 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya											
Kedeputian I																			
NIHIL																			
Kedeputian II																			
NIHIL																			
Kedeputian III																			
NIHIL																			
Kedeputian IV																			
NIHIL																			
Kedeputian V																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			

Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Juni 2020

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran			
								Dibawah Penguasaan		Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara		
								Ya	Tidak													
Kedeputian I																						
NIHIL																						
Kedeputian II																						
NIHIL																						
Kedeputian III																						
1	28 Mei 2020	Komisi Yudisial	Jalan Kramat Raya No.57, RT.08 / RW.08, Kramat, Senen, RT.8/RW.8, Kramat, RT.8/RW.8, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,	(021) 3905876	ASN	permohonan kelengkapan data	Penyelesaian Kasus Hukum			✓					✓	telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakumdam III/Siliwangi dengan nomor B.1332/HK.00.01/06/2020			12 Juni 2020			
2	13 Mei 2020	Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional	Jl. Tirtayasa VII No.20, RT.9/RW.4, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan	(021) 7392317	ASN/POLRI	hasil penelitian saran dan keluhan masyarakat	Penyelesaian Kasus Hukum									telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Dr. Ayub Faidiban dengan nomor: B.1371/HK.00.01/06/2020			16 Juni 2020			
3	26 Mei 2020	Kapolda Jawa Timur	Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur	(031) 8280748	POLRI	hasil penelitian saran dan keluhan masyarakat	Penyelesaian Kasus Hukum			✓				✓		telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Dr. Nisan Radian dengan nomor: B.1372/HK.00.01/06/2020			16 Juni 2020			
4	13 Mei 2020	Komisi Kepolisian Nasional	Jl. Tirtayasa VII No.20, RT.9/RW.4, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan	(021) 7392317	ASN/POLRI	Permohonan informasi penanganan saran dan keluhan masyarakat	Penyelesaian Kasus Hukum			✓				✓		telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abdul Rahman Naba dengan nomor B.1374/HK.00.01/06/2020			16 Juni 2020			
Kedeputian IV																						
1	22 Juni 2020	Badan Penelitian Kemhan R	Jl. Jati 1 Rt.06/6 Pd. Labu, Jaksel	081584348892	PNS	Permohonan bantuan dalam rangka penelitian	Pengumpulan data litbang tentang Evaluasi Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020	✓			dokumentasi hp pribadi peneliti				audiensi		Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidkooor Hanneg dengan disposisi kepada Asdep 4 untuk diterima			29 Juni 2020		
Kedeputian V																						
NIHIL																						
Kedeputian VI																						
NIHIL																						
Kedeputian VI																						
NIHIL																						

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Juli 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
Kedeputian I																			
NIHIL																			
Kedeputian II																			
NIHIL																			
Kedeputian III																			
NIHIL																			
Kedeputian IV																			
1	06 Juli 2020	Badan Penelitian Kemhan RI,	Jl. Jati 1 Rt.06/6 Pd. Labu, Jaksel	08131899909	PNS	Permohonan Bantuan Pengumpulan Data	Pengumpulan data litbang evaluasi kebijakan pertahanan negara	✓	-	dokumentasi hp pribadi peneliti	-	audiensi	Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidkoo Hanneg dengan disposisi kepada Asdep 4 untuk siapkan bahan	-	-	16 Juli 2020	-	-	
Kedeputian V																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Agustus 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
Kedeputian I																			
NIHIL																			
Kedeputian II																			
NIHIL																			
Kedeputian III																			
1	17 April 2020	Walikota Surabaya	Jl. Taman Surya No.1, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur	(031) 5312144	ASN	permohonan salinan data eigenom	Penyelesaian Kasus Hukum	✓					telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Surabaya dengan nomor: B2070/HK.00.01/08/2020			06 Agustus 2020			
Kedeputian IV																			
NIHIL																			
Kedeputian V																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan September 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Kedeputian I											
								NIHIL											
								Kedeputian II											
								NIHIL											
								Kedeputian III											
								NIHIL											
								Kedeputian IV											
								NIHIL											
								Kedeputian V											
								NIHIL											
								Kedeputian VI											
								NIHIL											
								Kedeputian VI											
								NIHIL											

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Oktober 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Kedeputian I											
								NIHIL											
								Kedeputian II											
								NIHIL											
								Kedeputian III											
								NIHIL											
								Kedeputian IV											
								NIHIL											
								Kedeputian V											
								NIHIL											
								Kedeputian VI											
								NIHIL											
								Kedeputian VI											
								NIHIL											

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan November 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran		
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
																				Ya
Kedeputian I																				
NIHIL																				
Kedeputian II																				
NIHIL																				
Kedeputian III																				
NIHIL																				
Kedeputian IV																				
1	10 November 2020	Universitas Pertahanan, Jakarta	Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat	08215866585	Mahasiswa	Permohonan Izin Penelitian a/n Mochamad Mustofa Wijaksono	Penyusunan tesis	✓	-	dokumentasi hp pribadi peneliti	-		audiensi	-	Ditindaklanjuti oleh Deputy Bidkoor Hanneq dengan disposisi kepada Asdep 4 untuk diatur pelaksanaannya	-	B-135/HN.00.02/11/2020	11 November 2020	-	-
2	19 November 2020	Universitas Pertahanan, Kemhan	Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat	05359442388	Mahasiswa	Permohonan Izin Penelitian	Penyusunan tesis	✓	-	dokumentasi hp pribadi peneliti	-		audiensi	-	Ditindaklanjuti oleh Deputy Bidkoor Hanneq dengan disposisi kepada Asdep 3 untuk ditindaklanjuti	-	-	20 November 2020	-	-
3	11 November 2020	Universitas Pertahanan, Jakarta,	Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat	08123210374	Mahasiswa	Permohonan Izin Penelitian	Penyusunan Tesis	✓	-	dokumentasi hp pribadi peneliti	-		audiensi	-	Ditindaklanjuti oleh Deputy Bidkoor Hanneq dengan disposisi kepada Asdep 4 untuk diatur pelaksanaannya	-	Surat Keterangan Penelitian Nomor : 92/HN.00.02/12/2022	26 November 2020	-	-
Kedeputian V																				
NIHIL																				
Kedeputian VI																				
NIHIL																				
Kedeputian VI																				

**Laporan Unit Pelayanan Publik
Bulan Desember 2020**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
								Dibawah Penguasaan	Belum didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/Mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
Kedeputian I																			
NIHIL																			
Kedeputian II																			
NIHIL																			
Kedeputian III																			
1	23 Oktober 2020	Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Mandiri, Jamb	RT.07 Kel. Sungai Putri, Kec. Danau Sipin, Jambi	081387216191	Petani	perihal rapat di Kemenko Polhukam tidak dibuat notulen rapat	Penyelesaian Kasus Hukum	✓			✓	✓		✓	telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Karma Acu dengan nomor: B4180/HK.00.01/12/2020,		08 Desember 2020		
Kedeputian IV																			
NIHIL																			
Kedeputian V																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			
Kedeputian VI																			
NIHIL																			